



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Sutan Syahrir No. 14 Pangkalan Bun

Telp : (0532) 21045 E-mail : bkdkobar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

Dalam laporan ini disampaikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan melakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja. Selain itu juga memuat perbandingan antara capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya serta efektivitas penggunaan sumber daya.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan dan pelaksanaan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023

KEPALA BADAN



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

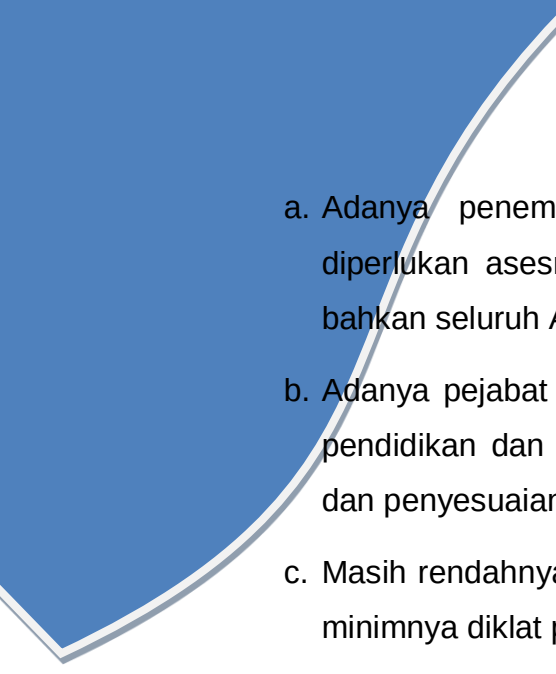
Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Peringkat Kinerja
1.	Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase peningkatan kompetensi ASN	86,00 %	97,66%	113,56%	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	6,67 %	46,15%	691,90%	
Capaian sasaran strategis 1					402,73%	
2.	Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang lulus diklat	77,00 %	99,05%	128,64%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					128,64%	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 265,69% dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- 
- A blue decorative graphic consisting of a curved shape with a white border, located in the top-left corner of the page.
- a. Adanya penempatan ASN yang tidak sesuai kompetensi sehingga diperlukan asesmen dan uji kompetensi kepada kepada sebagian besar bahkan seluruh ASN;
 - b. Adanya pejabat fungsional hasil penyetaraan yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan dan kompetensi sehingga diperlukan peningkatan kompetensi dan penyesuaian pendidikan pejabat fungsional hasil penyetaraan;
 - c. Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN di Kotawaringin Barat karena minimnya diklat peningkatan kompetensi yang di ikuti;
 - d. Masih rentan terjadinya pelanggaran disiplin ASN meskipun telah ada sistem presensi elektronik.
 - e. Formasi CASN yang di dapat tidak terisi karena tidak ada pelamar/pelamar tidak lolos passing grade/pelamar yang diterima mengundurkan diri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Data Umum Perangkat Daerah	2
1.3. Aspek Strategis	8
1.4. Permasalahan Utama	11
1.5. Dasar Hukum	11
1.6. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	19
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja	29
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	40
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.5 Realisasi Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Solusi	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta Jabatan BKPP	3
Tabel 1.2 Data Pegawai	6
Tabel 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai	6
Tabel 1.4 Data Aset	7
Tabel 1.5 Analisa SWOT dalam pengambilan kebijakan BKPP	10
Tabel 2.1 Sasaran Renstra 2017 – 2022	15
Tabel 2.2 Sasaran Renstra 2020 – 2022	16
Tabel 2.3 Matrik Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	18
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BKPP	20
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan BKPP	22
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja BKPP	23
Tabel 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Strategis	24
Tabel 2.8 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang	25
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2 Capaian Kinerja BKPP	29
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1	29
Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama 1	33
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja IKU 1	34
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1	34
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 Terhadap Target Renstra	34
Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama 2	36
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja IKU 2	37
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 2	37
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 Terhadap Target Renstra	37
Tabel 3.12 Realisasi dan Capaian Keuangan Sasaran Strategis 1	37
Tabel 3.13 Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2	38
Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama 3	39
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja IKU 3	39
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 3	39
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 Terhadap Target Renstra	39
Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian Keuangan Sasaran Strategis 2	40
Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
Tabel 3.20 Kegiatan Lintas Sektoral	42

A large blue decorative graphic in the top-left corner of the page, featuring a curved, shield-like shape with a white border.

Tabel 3,21 Realisasi Anggaran

43

Tabel 3.22 Rincian Realisasi Anggaran

43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Data Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, BKPP mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1.2.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan:

- a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- b. Membantu Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam seluruh tahapan proses manajemen ASN daerah yaitu upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian ASN daerah.

1.2.2 Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan:

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian.
- b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian daerah.
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian daerah.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

- e. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional.
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara.
- g. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
- h. Penyelenggaraan Administrasi Aparatur Sipil Negara.
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
- j. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peta Jabatan BKPP

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala 2. Sekretaris 1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 2) Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program 3. Kepala Bidang Diklat dan Data 1) Kasubbid Pengembangan SDM 2) Kasubbid Data dan Informasi 3) Kasubbid Diklat, Teknis dan Fungsional 4. Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi 1) Kasubbid Formasi dan Mutasi Pindah 2) Kasubbid Jabatan 3) Kasubbid Mutasi Pengangkatan 5. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 1) Kasubbid Kesejahteraan dan Hak Pegawai 2) Kasubbid Disiplin 3) Kasubbid KORPRI	1) Dibawah Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan ● Pengelola Barang Milik Negara ● Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur ● Pengelola Kepegawaian ● Pengadministrasi Umum ● Petugas Keamanan ● Pengemudi 2) Dibawah Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program ● Bendahara ● Pengelola Keuangan ● Verifikator Keuangan ● Pengadministrasi Keuangan ● Analis Perencanaan Anggaran ● Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1) Analis Kepegawaian 2) Pranata Komputer

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
	3) Dibawah Kasubbid Pengembangan SDM • Analis Pengembangan SDM Aparatur • Pengelola Profesi SDM 4) Di bawah Kasubbid Data dan Informasi • Pengelola Data • Pranata Kearsipan 5) Di bawah Kasubbid Diklapim, Teknis dan Fungsional • Pengelola Penyelenggara Diklat • Pranata Diklat 6) Di bawah Kasubbid Formasi dan Mutasi Pindah • Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai • Penyusun Rencana Mutasi 7) Di bawah Kasubbid Jabatan • Analis Jabatan • Pengelola Pengembangan Karir • Analis Pengembangan Karir 8) Di bawah Kasubbid Mutasi Kepangkatan • Pengelola Kepegawaian • Pengadministrasi Kepegawaian 9) Di bawah Kasubbid Kesejahteraan dan Hak Pegawai • Analis Kesejahteraan SDM Aparatur • Pengelola Kepegawaian • Pengadministrasi Kepegawaian 10) Di bawah Kasubbid Disiplin • Pengelola Disiplin Pegawai • Analis Pelanggaran Disiplin 11) Di bawah Kasubbid KORPRI • Pengadministrasi	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
	Kepegawaian • Pengadministrasi Umum	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengalami dua kali perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 43 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel 1.2 Data Pegawai

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D 3	SM A	S D	PNS/ CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1	1					1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	4	2	2	2	2				4	
	2. Pengawas	2		2	1	1				2	
	3. Pelaksana	25	16	9		9	6	10		11	14
C	Jabatan Fungsional	11	7	4	1	10				11	
	Jumlah	43	25	18	5	22	6	10	0	29	14

Sumber: Data Pegawai BKPP Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	Petugas Keamanan	1	0	1
	Pengemudi	1	0	1
Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program	Bendahara	1	1	0
	Pengelola Keuangan	1	0	1
	Verifikator Keuangan	1	1	0
	Pengadministrasi Keuangan	1	0	1
	Analisis Perencanaan Anggaran	1	1	0
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
Subbid Diklatpim, dan Teknis	Pengelola Penyelenggara Diklat	1	1	0
	Pranata Diklat	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Fungsional				
Subbid Data dan Informasi	Pengelola Data	1	0	1
	Pranata Kearsipan	1	1	0
Subbid Pengembangan SDM	Pengelola Profesi SDM	1	0	1
	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	1
Subbid Mutasi Kependidikan	Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai	1	1	0
	Penyusun Rencana Mutasi	1	0	1
Subbid Jabatan	Analisis Jabatan	1	0	1
	Pengelola Pengembangan Karir	1	1	0
	Analisis Pengembangan Karir	1	0	1
Subbid Mutasi Kependidikan	Pengelola Kepegawaian	2	0	2
	Pengadministrasian Kepegawaian	1	0	1
Subbid Kesejahteraan dan Hak Pegawai	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1	0
Kasubbid Disiplin	Pengelola Disiplin Pegawai	2	0	2
	Analisis Pelanggaran Disiplin	1	0	1
Subbid KORPRI	Pengadministrasian Kepegawaian	1	0	1
	Pengadministrasian Umum	1	0	1
Pejabat Fungsional	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Pertama	3	2	1
	Analisis Kepegawaian Mahir / Terampil	6	0	6
	Pranata Komputer Muda/Pertama	2	0	2
	Pranata Komputer Mahir/Terampil	2	0	2
TOTAL		47	13	34

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	1	487.000.000,00
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	2	170.412.000,00
		Alat-alat Angkut	14	779.710.400,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	23.694.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	797	1.837.415.519,74
		Alat Studio Komunikasi	28	222.945.785,00
		Alat Laboratorium	2	2.970.000,00
		Alat Persenjataan	9	39.270.000,00
		Alat Komputer	329	2.597.188.460,00
		Alat Kesehatan	2	2.000.000,00

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	10	3.512.048.002,27
		Bangunan Lainnya	1	215.646.250
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	0	0
		Jembatan	0	0
		Instalasi Listrik dan Telp	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	70	10.353.500,00
		Barang Bercorak Kesenian	0	0
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	3	304.925.600
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

a) Faktor eksternal

1. Biaya pengembangan sumber daya manusia ASN yang cukup tinggi guna mencapai ASN yang profesional;
2. Pengawasan disiplin yang belum efektif dan efisien;
3. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan.

b) Faktor internal berupa komitmen dari Kepala Daerah, Kepala BKPP dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

Berdasarkan kedua faktor di atas, terdapat sejumlah tantangan dan peluang yang harus dilakukan oleh BKPP ke depannya, yaitu:

a) Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Manajemen ASN yaitu:

1. Momentum peningkatan kompetensi ASN dengan kewajiban mengikuti Diklat Teknis 20 jam / tahun;
2. Momentum penegakkan disiplin ASN dengan pengimplementasian aplikasi e-kinerja;

3. Penempatan ASN berdasarkan kompetensi sesuai amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

b) Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Manajemen ASN kedepan yaitu:

1. Peningkatan kebijakan pelatihan singkat dan tepat sasaran bagi ASN;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengawasan disiplin ASN;
3. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen ASN.

Tabel 1.5 Analisa SWOT dalam strategi pengambilan kebijakan BKPP

SWOT	KEKUATAN (S) Komitmen Kepala Daerah, Kepala BKPP dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN	KELEMAHAN (W) 1. Biaya pengembangan sumber daya manusia ASN yang cukup tinggi guna mencapai ASN yang profesional; 2. Pengawasan disiplin yang belum efektif dan efisien; 3. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan.
TANTANGAN (T) 1. Momentum peningkatan kompetensi ASN dengan kewajiban mengikuti Diklat Teknis 20 jam / tahun; 2. Momentum penegakkan disiplin ASN dengan pengimplementasian aplikasi e-kinerja; 3. Penempatan ASN berdasarkan kompetensi sesuai amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.	1. Persentase aparatur yang lulus diklat 2. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN 3. Persentase peningkatan kompetensi ASN	
PELUANG (O) 1. Peningkatan kebijakan pelatihan singkat dan tepat sasaran bagi ASN; 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengawasan disiplin ASN; 3. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen ASN.		

1.4 Permasalahan Utama

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban setiap ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam per tahun;
2. Masih belum optimalnya penegakan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
3. ASN sebagai pelayan masyarakat masih di anggap tidak optimal dalam melayani serta kinerja ASN yang rendah dan tidak profesional menimbulkan birokrasi yang berkepanjangan. Selain itu, penjenjangan karir ASN masih belum sesuai kompetensi dan penempatan yang masih belum merata.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran



Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K = KETAKWAAN,
H = HARMONIS,
L = LANGGENG,
A = AMAN,
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,
U = UNGGUL,
R = RELIGIUS,
A = AMANAH,
N = NYATA,
I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **pertama** yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
transparan”**

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 dengan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Strategis BKPP 2017 – 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA/RUMUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi Ke - 1 : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.				
1	Meningkatkan Manajemen ASN yang Profesional	1. Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	$(\text{Jumlah ASN yg sesuai Kompetensi} / \text{Jumlah ASN}) \times 100\%$
			Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	$((X_{n-1} - X_n) / X_{n-1}) \times 100\%$ $X_{n-1} = \% \text{ Pelanggaran Tahun Lalu}$ $X_n = \% \text{ Pelanggaran Tahun Berjalan}$
		2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur sesuai Kompetensi	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat dengan Kategori Memuaskan dan Baik	$(\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat dengan kategori memuaskan dan baik} / \text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat}) \times 100$

Sumber: Renstra BKPP

Namun, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB tanggal 13 Agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Rencana Strategis BKPP 2020 - 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA/RUMUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi Ke - 1 : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.				
1	Meningkatkan Manajemen ASN yang Profesional	1. Peningkatan Kinerja ASN melalui pembinaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	$(\text{Jumlah ASN yg sesuai Kompetensi} / \text{Jumlah ASN}) \times 100\%$
			Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	$((X_{n-1} - X_n) / X_{n-1}) \times 100\%$ X _{n-1} = % Pelanggaran Tahun Lalu X _n = % Pelanggaran Tahun Berjalan
		2. Peningkatan Kualitas ASN melalui pengembangan Kompetensi	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat	$(\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat} / \text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat}) \times 100$

Sumber: Renstra BKPP

Sasaran yang ingin dicapai pada misi ini yaitu “meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan” yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen ASN yang profesional. Matrik sasaran dan tujuan digambarkan sebagai berikut:



Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabuapten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Tabel 2.3 Matrik Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
1	Meningkatkan manajemen ASN yang profesional	Persentase kualitas SDM aparatur sesuai kompetensi	Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme	1. Persentase peningkatan kompetensi ASN		80,00	82,00	82,00	84,00	86,00
				2. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN		4,00	4,15	5,88	6,25	6,67
			Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	1. Persentase aparatur yang lulus diklat		71,00	72,00	75,00	76,00	77,00
Ket : * menyesuaikan dengan target pada Renstra Perubahan										
Sumber: Data di olah										

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BKPP (Perubahan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%) Tahun			Indikator	Formula
		2020	2021	2022		
Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase peningkatan kompetensi ASN	82,00	84,00	86,00	1. Jumlah pegawai yang diangkat, dipindahkan, diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional 2. Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama 3. Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi lelang terbuka 4. Jumlah keputusan PNS yang di mutasi 5. Keputusan Kenaikan Pangkat ASN 6. Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS 7. Keputusan Pencantuman Gelar 8. Keputusan Peninjauan Masa Kerja 9. Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi tugas belajar 10. Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	$\left(\frac{\text{Jumlah ASN yang sesuai Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \right) \times 100\%$

					administrasi ijin belajar 11. Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ujian dinas 12. Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ujian penyesuaian ijazah	
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	5,88	6,25	6,67	Jumlah penjatuhan hukuman disiplin ASN	(Pelanggaran tahun lalu – pelanggaran tahun berjalan) / pelanggaran tahun lalu
Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang lulus diklat	75,00	76,00	77,00	1. Jumlah CPNS Daerah yang mengikuti Diklat Prajabatan 2. Jumlah peserta diklatpim tingkat III 3. Jumlah peserta diklatpim tingkat IV 4. Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Kepegawaian 5. Jumlah PNS yang mengikuti Rakor Kepegawaian	(Jumlah ASN yg lulus Diklat / jumlah ASN yg mengikuti Diklat) × 100%
Sumber: IKU BKPP						

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja Tahunan diperlukan untuk memberikan fokus penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2022 BKPP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase peningkatan kompetensi ASN	86
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	6,67
Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang lulus diklat	77

Sumber: RKT BKPP Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotawaringin Barat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase peningkatan kompetensi ASN	86
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	6,67
Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang lulus diklat	77

Sumber: PK Perubahan BKPP Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait Langsung Dengan
Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran 1: Peningkatan Kinerja ASN Melalui Pembinaan, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme				
Program Kepegawaian Daerah		1.314.146.300	1.294.036.300	(201.100.00)
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		297.636.950	297.636.550	(400)
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	138.414.250	138.414.250	0
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.999.900	24.999.900	0
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	103.804.000	103.804.000	0
	Pengelolaan Data Kepegawaian	30.418.800	30.418.400	(400)
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		238.742.950	257.633.950	18.891.000
	Pengelolaan Mutasi ASN	187.220.000	181.700.000	(5.520.000)
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	51.522.950	51.522.950	0
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		593.203.000	549.464.400	(43.738.600)
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	8.400.000	19.335.400	10.935.400
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	584.803.000	530.129.000	(54.674.000)
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		184.563.400	189.301.400	4.738.000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	29.999.800	29.999.800	0
	Pembinaan Disiplin ASN	135.651.150	140.389.150	4.738.000
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.983.600	15.983.600	0
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.928.850	2.928.850	0
Sasaran 2: Peningkatan Kualitas ASN Melalui Pengembangan Kompetensi				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.748.143.520	2.308.300.820	(439.842.700)
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		60.899.850	60.899.850	0

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	60.899.850	60.899.850	0
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.687.243.670	2.247.400.970	(439.842.700)
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.687.243.670	2.247.400.970	(439.842.700)
	TOTAL	4.062.289.820	3.602.337.120	(459.952.700)

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel 2.8 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.826.459.180	6.054.136.880	1.227.677.700
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.258.050	49.848.050	(3.410.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.840.00	44.430.000	(3.410.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	980.000	980.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	980.000	980.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	980.000	980.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	980.000	980.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.498.050	1.498.050	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.998.305.220	4.087.992.380	89.687.160
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.943.956.330	4.048.578.330	104.622.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.100.000	3.625.000	525.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.573.890	34.834.050	(15.739.840)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	675.000	955.000	280.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.580.000	99.792.000	33.212.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.100.000	23.100.000	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.480.000	76.692.000	33.212.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.223.330	285.827.839	83.604.509
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.302.548	7.302.548	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.243.675	61.322.731	79.056
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.499.875	32.663.328	23.163.453
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.067.232	21.067.232	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.110.000	163.472.000 60.362.00	60.362.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.366.568	975.196.699	947.830.131
	Pengadaan Mebel	0	65.888.000	65.888.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.366.568	909.308.699	881.942.131
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.506.712	327.713.688	7.206.976
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.667.107	108.662.083	(1.005.024)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.439.605	217.651.605	8.212.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.219.300	227.766.224	69.546.924
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.375.800	33.845.800	7.470.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.837.500	45.492.000	13.654.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.006.000	148.428.424	48.422.424
TOTAL		4.826.459.180	6.054.136.880	1.227.677.700

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu pencapaian target kinerja diantaranya:

1. e-kinerja

aplikasi yang bermanfaat untuk memantau kedisiplinan ASN. Melalui aplikasi ini tingkat kehadiran ASN dapat terpantau.

The screenshot shows the 'Aplikasi Penilaian' interface. The 'Rekap Bulanan' section displays a table with columns for 'No', 'Nama', and 'Tanggal'. The table lists several employees and their attendance data for December 2022. The interface also includes a sidebar menu with options like 'Beranda', 'Data Pegawai', 'Kategori', 'Manajemen Shift', and 'Manajemen Pegawai'.

2. e-asesmen

aplikasi yang digunakan untuk mengukur dan menghimpun data kompetensi ASN yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan penempatan ASN agar sesuai dengan kompetensinya.

3. Sapasida

Aplikasi yang digunakan untuk menghimpun data administrasi ASN, sehingga usulan administrasi kepegawaian bisa lebih cepat dan efisien.

The screenshot shows the 'SAPA SIDA' interface. The main area displays a table with columns for 'No', 'Kode Dokumen', 'Nama Dokumen', 'Status Dokumen', 'Pilih', and 'Kategori'. The table lists several documents and their status. The interface also includes a sidebar menu with options like 'Beranda', 'Unduhan Digital', and 'Unduhan Laporan'.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91 \% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75\%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja BKPP Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Peringkat Kinerja
1.	Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase peningkatan kompetensi ASN	86,00 %	97,66%	113,56%	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	6,67 %	46,15%	691,90%	
Capaian sasaran strategis 1					402,73%	
2.	Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	Persentase aparatur yang lulus diklat	77,00 %	99,05%	128,64%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					128.64%	

Sumber: Data di olah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis “Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme”

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu: persentase peningkatan kompetensi ASN dan persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator yang ditargetkan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan kompetensi ASN	%	86,00 %	97,66%	113,56%
Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	6,67 %	46,15%	691,90%
Capaian kinerja sasaran				402,73%

Sumber: Data di olah

a) Persentase peningkatan kompetensi ASN.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotawaringin Barat selaku *leading sector* manajemen ASN di Kotawaringin Barat melakukan kegiatan - kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi ASN antara lain:

• Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan karir bagi PNS baik berupa pengangkatan/pelantikan dalam jabatan

struktural & fungsional maupun uji kompetensi terhadap pejabat pengawas dalam rangka pemetaan kompetensi.

Pada tahun 2022 tidak ada kegiatan lelang jabatan untuk JPTP, dan untuk kegiatan pemetaan kompetensi dilakukan asesmen terhadap pejabat fungsional dan pengawas sebanyak 67 orang yang terlaksana pada triwulan III dan IV; Pelantikan pejabat struktural dan fungsional terlaksana sebanyak 2 kali yaitu 30 orang pada triwulan I dan 198 orang pada triwulan II;

Jumlah SK pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan yang diterbitkan sebanyak 209 SK dan SK pemberhentian dari jabatan yang diterbitkan sebanyak 50 SK. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp. 175.705.790,000 dari pagu sebesar Rp. 181.700.000,00.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya usul kenaikan pangkat, pencantuman gelar dan peninjauan masa kerja PNS serta Pengangkatan CPNS Menjadi PNS.

Untuk tahun 2022 ini terdapat 875 PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat dan yang sudah disetujui sebanyak 812 PNS, Usul Pencantuman Gelar yang telah mendapat persetujuan oleh BKN Regional VIII sebanyak 87 orang, Usul Peninjauan Masa Kerja telah terbit 12 SK dan Usul pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 131 orang.

Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72.616.329,00 dari pagu sebesar Rp. 75.933.950,00.

• Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 2022 BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelenggarakan fasilitasi Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat

II serta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan metode Computer Based Test (CBT). Kegiatan ujian dinas diikuti 24 PNS, terdiri dari peserta Ujian Dinas tingkat I 18 PNS, sedangkan peserta Ujian Dinas Tingkat II 6 PNS. Seluruh peserta ujian dinas dinyatakan lulus (prosentase kelulusan 100%). Hasil yang ingin dicapai kegiatan ini meningkatnya kompetensi ASN melalui Ujian dinas tingkat I dan Tingkat II.

Untuk ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah yang mendaftar sebanyak 18 PNS, yang memenuhi syarat 15 PNS, lulus 14 PNS sedangkan 1 PNS tidak mengikuti ujian dikarenakan termasuk dalam jabatan fungsional.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pagu sebesar Rp. 19.335.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 18.896.100,00.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi PNS yang ingin meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan metode tugas belajar dan ijin belajar. Sepanjang tahun 2022 tercatat 88 PNS yang mengikuti tugas belajar dengan rincian sumber dana: 9 dari APBD Pemkab Kobar, 2 dari Bappenas, 3 dari Kemenkes dan 74 dari pribadi/mandiri PNS yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memberikan bantuan biaya tugas belajar untuk 9 orang PNS yang telah menjalankan pendidikan terdiri dari Program Pendidikan S1/D-IV 2 PNS dan Program Pendidikan S2 2 PNS, Program Pendidikan Dokter Spesialis 4 PNS dan Program Profesi Fisioterapi 1 PNS. Selanjutnya untuk peningkatan Peningkatan pendidikan melalui ijin belajar pada tahun 2022 terdapat 82 PNS yg melaksanakan pendidikan melalui ijin

belajar dengan rincian 30 PNS ijin belajar baru dan 52 PNS perpanjangan ijin belajar. Hasil dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan ijin belajar.

Selain itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga diberi penugasan untuk memfasilitasi para lulusan SLTA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan pada sekolah ikatan dinas dengan data sebagai berikut:

- a. STTD 15 orang
- b. STIN 1 orang
- c. IPDN 7 orang
- d. STIS 6 orang
- e. STMKG 2 orang

Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terjaringnya putra daerah yang masuk ke sekolah kedinasan sesuai dengan bidang ilmu yang diminati, khusus untuk Alumni STTD dikembalikan ke Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tenaga ahli dan profesional di bidang transportasi darat dapat terpenuhi formasinya sesuai dengan kebutuhan Instansinya.

Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 530.129.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 492.747.435,00.

- **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- 1. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN**

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Pegawai di sejumlah SKPD. Untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima penetapan Kebutuhan Pegawai ASN sebanyak 283 formasi PPPK dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. 200 formasi guru
- b. 69 formasi tenaga kesehatan
- c. 14 formasi tenaga teknis

Selanjutnya pada tahun 2022, terdapat 80 SK mutasi yang telah terbit yang terdiri dari 25 mutasi keluar daerah, 13 mutasi masuk ke dalam daerah dan 42 mutasi dalam daerah. Anggaran yang terserap sebesar Rp.103.233.309,00 dari pagu sebesar Rp. 138.414.250,00. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya formasi dan distribusi pegawai untuk mengisi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rincian dari indikator kinerja sasaran strategis ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja	Jumlah		Total
	2021	2022	
Jumlah pegawai yang diangkat, dipindahkan, diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional	1030	487	1517
Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	84	0	84
Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi lelang terbuka/uji kompetensi	120	0	120
Jumlah keputusan PNS yang di mutasi	53	80	133
Keputusan Kenaikan Pangkat ASN	502	812	1314
Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	0	131	131
Keputusan Pencantuman Gelar	41	87	128
Keputusan Peninjauan Masa Kerja	7	12	19
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi tugas belajar	14	88	102
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ijin belajar	102	82	184
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ujian dinas	77	24	101
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ujian penyesuaian ijazah	39	15	54
Jumlah	2069	1818	3887

Sumber: Data di olah

Dari data di atas terlihat jumlah ASN yang disesuaikan kompetensinya selama 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 3.909 orang dari total 3980 ASN Kotawaringin Barat dengan persentase sebesar:

$$\frac{3.887}{3980} \times 100\% = 97,66\%$$

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja
Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan kompetensi ASN	%	86	97,66	113,56

Sumber: Data di olah

Capaian ini terus menunjukkan peningkatan dari capaian sebelumnya yang hanya sebesar 33,26% pada tahun 2018, 74,48% pada tahun 2019, 83,52% pada tahun 2020 dan 93,15% pada tahun 2021.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)						Capaian Kinerja (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan kompetensi ASN	N/A	33,26	74,48	83,52	93,15	97,66	N/A	41,58	90,83	101,85	110,89	113,56

Sumber: Data di olah

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 Terhadap Target Renstra

Tahun	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
2017	N/A	N/A
2018	80	72,85
2019	82	74,48
2020	82	83,52
2021	84	93,15
2022	86	97,66

Sumber: Data di olah

Capaian ini juga telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86%. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator ini antara lain:

- Telah terbentuknya Tim Asesmen Mandiri Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga bisa dilakukan lebih banyak kegiatan asesmen dan uji kompetensi terhadap PNS
- Pemkab Kotawaringin Barat mampu melaksanakan simulasi dan fasilitasi kegiatan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh peserta berhasil lulus dalam ujian tersebut.

- Meningkatnya minat PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui ijin belajar dan tugas belajar dengan adanya SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.
- Adanya Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Layanan administrasi kepegawaian melalui SAPASIDA.

Tindak lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan capaian tujuan ini antara lain perlunya koordinasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang intensif sehingga diupayakan Pemkab Kotawaringin Barat melaksanakan secara mandiri berbagai kegiatan pengembangan kompetensi agar bisa lebih banyak PNS yang terfasilitasi dalam peningkatan kompetensinya yang akan berdampak positif terhadap peningkatan indeks profesionalitas ASN. Total anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja utama ini sebesar Rp. 863.198.963,00 dari pagu sebesar Rp. 945.512.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 91,29%. Ada sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 82.313.637,00.

b. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN

Salah satu ciri ASN Profesional adalah selalu mengutamakan kedisiplinan. BKPP Kotawaringin Barat selalu menekankan sikap disiplin kepada seluruh ASN dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menekan pelanggaran disiplin ASN. Setiap tahun BKPP menyampaikan surat edaran terkait penanganan disiplin ASN. Untuk meminimalisir pelanggaran disiplin, telah dilakukan sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, *core value* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* BANGGA MELAYANI BANGSA. Secara rutin dan berkala, BKPP selalu memonitoring melalui aplikasi presensi elektronik dan untuk meningkatkan kedisiplinan kehadiran ASN. Penanganan pelanggaran disiplin

dilakukan secara berjenjang mulai dari level unit kerja, SOPD hingga laporan ke BKPP melalui proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN. Maksud dan tujuannya adalah untuk menangani dan memproses setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN. Setiap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi ASN lain. Dari sejumlah dugaan kasus pelanggaran disiplin, ada 7 ASN yang telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah ditetapkan SK penjatuhan hukuman disiplinnya. Rincian untuk 7 hukuman disiplin yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 4 ASN dijatuhi hukuman disiplin berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- 1 ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- 2 ASN dijatuhi hukuman disiplin ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Anggaran yang diserap untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 149.230.750,00 dari pagu sebesar Rp 156.372.750,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,43%. Ada sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 7.142.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah telah terbitnya SK penjatuhan hukuman disiplin PNS.

Rincian dari indikator kinerja utama ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama II

Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penjatuhan hukuman disiplin	16	16	15	14	13	7

ASN						
-----	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data di olah

Dari data di atas telah terlihat penurunan jumlah penjatuhan hukuman disiplin yang cukup signifikan di banding tahun sebelumnya dengan capaian sebesar:

$$\frac{13 - 7}{13} \times 100\% = 46,15\%$$

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja
Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	6,67	46,15	691,90

Sumber: Data di olah

Implementasi dari aplikasi presensi ekinerja telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan terbukti efektif dalam menurunkan pelanggaran disiplin.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)						Capaian Kinerja (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	N/A	0	6,25	6,67	7,14	46,15	N/A	0	150,60	113,44	114,29	691,90

Sumber: Data di olah

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU II Terhadap Target Renstra

Tahun	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
2017	N/A	N/A
2018	4	0
2019	4,15	6,25
2020	5,88	6,67
2021	6,25	7,14
2022	6,67	46,15

Sumber: Data di olah

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian Keuangan Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan kompetensi ASN	945.512.600	863.198.963	91,29%
Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	156.372.750	149.230.750	95,43%

Capaian kinerja keuangan	1.101.885.350	1.012.429.713	91,88%
---------------------------------	---------------	---------------	--------

2. Sasaran strategis “Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi”

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu: persentase aparatur yang lulus diklat.

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase aparatur yang lulus diklat	%	77,00 %	99,05%	128,64%
Capaian kinerja sasaran				128,64%

Sumber: Data di olah

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikatornya ini dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, Pelatihan Kepemimpinan/Penjenjangan maupun diklat teknis dan fungsional lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi CPNS/PNS daerah melalui Pelatihan Dasar maupun Pelatihan Kepemimpinan/Penjenjangan serta diklat – diklat teknis dan fungsional lainnya.

- **Latsar CPNS**

Pelatihan Dasar (Latsar) diperuntukkan bagi CPNS yang berjumlah 165 orang dan mengikuti diklat di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Hasil dari Latsar ini, sebanyak 163 orang peserta dinyatakan lulus dan 2 orang tidak lulus.

- **Pelatihan Kepemimpinan**

Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP) pada tahun ini dapat mengirimkan sebanyak 15 PNS ke BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) mengirimkan sebanyak 24 PNS ke BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN) pada tahun ini mengirimkan peserta sebanyak 7 PNS. 2 Peserta mengikuti PKN di

BPSDM Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan 5 peserta mengikuti PKN di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Semua peserta pelatihan kepemimpinan berhasil lulus.

Rincian dari indikator kinerja sasaran strategis ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama 3

Indikator	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Yang Lulus Diklat
CPNS Daerah yang mengikuti Latsar	165	163
PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	46	46
Jumlah	211	209

Sumber: Data di olah

Dari data di atas terlihat jumlah peserta yang lulus diklat sebanyak 209 dari 211 PNS yang mengikuti diklat dengan persentase sebesar:

$$\frac{209}{211} \times 100\% = 99,05\%$$

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja
Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	%	77	99,05	128,64

Sumber: Data di olah

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)						Capaian Kinerja (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase aparatur yang lulus diklat	N/A	51,72	90,41	100	99,35	99,05	N/A	72,85	125,75	133,33	130,73	128,64

Sumber: Data di olah

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU III Terhadap Target Renstra

Tahun	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
2017	N/A	N/A
2018	71	51,72
2019	72	90,41
2020	75	100
2021	76	99,35

2022	77	99,05
------	----	-------

Sumber: Data di olah

Capaian ini melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77%, karena seyogyanya setiap peserta yang mengikuti diklat memang ditargetkan untuk lulus. Setidaknya diperoleh gambaran bahwa ASN di Kotawaringin Barat telah memiliki kompetensi yang memadai sehingga bisa meraih kelulusan pada diklat yang diikuti. Dua orang peserta yang tidak lulus Latsar dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai CPNS.

Kedepannya diupayakan Pemkab Kotawaringin Barat mampu melaksanakan diklat secara mandiri agar bisa lebih banyak lagi ASN yang bisa mengikuti. Total anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja utama ini sebesar Rp 2.305.261.466,00 dari pagu sebesar Rp 2.308.300.820,00. Ada sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 3.039.354,00.

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Keuangan Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian
Persentase aparatur yang lulus diklat	2.308.300.820,00	2.305.261.466,00	99,87%
Capaian kinerja keuangan	2.308.300.820,00	2.305.261.466,00	99,87%

Sumber: Data di olah

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis yang diemban oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari visi misi RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat. Setiap daerah tentunya punya visi dan misi masing – masing yang belum tentu sama. Akibatnya sulit untuk menemukan data pembandingan untuk membandingkan antara capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan daerah lain di sekitarnya maupun dengan data nasional. Pada bahasan ini, tidak ada data pembandingan yang ditampilkan.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme	86,00	97,66	113,56	945.512.600	863.198.963	91,29	19,61
		6,67	46,15	691,90	156.372.750	149.230.750	95,43	86,21
2	Peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi	77	99,05	128,64	2.308.300.820	2.305.261.466	99,87	22,37
TOTAL EFISIENSI ANGGARAN								128,19

Sumber: Data di olah

Dari tabel di atas terlihat tingkat efisiensi sebesar 128,19%. Total pagu anggaran untuk mencapai target kinerja sebesar Rp. 3.410.186.170,00 dan terserap sebesar Rp 3.317.691.179,00. Ada penghematan anggaran

sebesar Rp. 92.494.991,00. Efisiensi ini di capai dengan di dukung hal – hal sebagai berikut:

1. Telah terbentuknya Tim Asesmen Mandiri Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga bisa dilakukan lebih banyak kegiatan asesmen dan uji kompetensi terhadap PNS
2. Pemkab Kotawaringin Barat mampu melaksanakan simulasi dan fasilitasi kegiatan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh peserta berhasil lulus dalam ujian tersebut.
3. Meningkatnya minat PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui ijin belajar dan tugas belajar dengan adanya SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.
4. Adanya Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Layanan administrasi kepegawaian melalui SAPASIDA.

Selain dari sisi anggaran, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lian		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Layanan kepegawaian berbasis IT	Dinas Kominfo	Penyediaan aplikasi e-kinerja, e-asesmen dan sapisida	Aplikasi e-kinerja, e-asesmen dan sapisida	Mendukung pencapaian sasaran strategis 1
2	Seleksi CASN	Dinas Dikbud	Validasi dan verifikasi data dapodik	Data pelamar PPPK yang memenuhi persyaratan kualifikasi/kompetensi	
		Dinas Kesehatan	Validasi dan verifikasi data SISDMK		
3	Fasilitasi Sekolah Kedinasan	Dinas Perhubungan	Penjaringan Putra Daerah Untuk mengikuti Sekolah Kedinasan di STTD	PNS Lulusan STTD yang Profesional di Bidang Transportasi Darat	

Sumber: Data di olah

Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengalokasikan Belanja sebesar Rp 8.888.749.000,00 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp 9.656.474.000,00. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 9.441.766.112 atau sebesar 97,98%. Data anggaran dan realisasi anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional	8.598.861.211	8.384.311.612	97,50
	- Belanja Pegawai	4.048.578.330	3.989.491.505	98,54
	- Belanja Barang/Jasa	4.550.282.881	4.394.820.107	96,58
2	Belanja Modal	1.057.612.789	1.057.454.500	99,99
	- Belanja Peralatan & Mesin	981.205.789	981.169.530	100
	- Belanja Gedung & Bangunan	66.507.000	66.384.970	99
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	9.900.000	9.900.000	100
TOTAL		9.656.474.000	9.441.766.112	97,78

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.848.050,00	48.028.136,00	96,35
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.430.000,00	42.610.086,00	95,90
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	980.000,00	980.000,00	100,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	980.000,00	980.000,00	100,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	980.000,00	980.000,00	100,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	980.000,00	980.000,00	100,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.498.050,00	1.498.050,00	100,00

	Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.087.992.380,00	4.028.258.855,00	98,54
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.048.578.330,00	3.989.491.505,00	98,54
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.625.000,00	3.620.000,00	99,86
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.834.050,00	34.192.350,00	98,16
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	955.000,00	955.000,00	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.792.000,00	83.851.799,00	84,03
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.692.000,00	60.751.799,00	79,22
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.827.839,00	262.394.461,00	91,80
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.302.548,00	7.296.150,00	99,91
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.322.731,00	61.322.000,00	100,00
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.663.328,00	32.505.090,00	99,52
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.067.232,00	21.061.940,00	99,97
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.472.000,00	140.209.281,00	85,77
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.196.699,00	975.160.440,00	100,00
5.1	Pengadaan Mebel	65.888.000,00	65.860.000,00	99,96
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	909.308.699,00	909.300.440,00	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.713.688,00	314.996.443,00	96,12
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,00	1.309.450,00	93,53
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.662.083,00	102.960.841,00	94,75
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.651.605,00	210.726.152,00	96,82
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.766.224,00	226.653.915,00	99,51
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.845.800,00	33.082.945,00	97,75
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.492.000,00	45.406.000,00	99,81
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.428.424,00	148.164.970,00	99,82
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	297.636.550,00	257.669.083,00	86,57

8.1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	138.414.250,00	103.233.309,00	74,58
8.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.999.900,00	24.315.900,00	97,26
8.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	103.804.000,00	99.873.388,00	96,21
8.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	30.418.400,00	30.246.486,00	99,43
9	Mutasi dan Promosi ASN	257.633.950,00	248.322.119,00	96,39
9.1	Pengelolaan Mutasi ASN	181.700.000,00	175.705.790,00	96,70
9.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.933.950,00	72.616.329,00	95,63
10	Pengembangan Kompetensi ASN	549.464.400,00	511.643.535,00	93,12
10.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	19.335.400,00	18.896.100,00	97,73
10.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	530.129.000,00	492.747.435,00	92,95
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	189.301.400,00	179.525.860,00	94,84
11.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	29.999.800,00	27.666.260,00	92,22
11.2	Pembinaan Disiplin ASN	140.389.150,00	133.247.150,00	94,91
11.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.983.600,00	15.983.600,00	100,00
11.4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.928.850,00	2.628.850,00	89,76
12	Pengembangan Kompetensi Teknis	60.899.850,00	59.990.377,00	98,51
12.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	60.899.850,00	59.990.377,00	98,51
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.247.400.970,00	2.245.271.089,00	99,91
13.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.247.400.970,00	2.245.271.089,00	99,91
Persentase Realisasi Anggaran				97,78

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 97,98 % yang berarti masuk dalam kategori capaian tinggi.

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Hasil Laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 265,69% dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**;
2. Capaian kinerja keuangan 97,98% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.441.766.112 dari pagu Rp 9.656.474.000 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **tinggi**.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada sasaran strategis peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, terdapat dua indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi ASN memperoleh capaian 97,66% dari target yang ditetapkan sebesar 86,00%. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan. Faktor utama tercapainya target kinerja ini adalah telah terbentuknya Tim Asesmen Mandiri Pemkab Kotawaringin Barat sehingga bisa mengakomodir lebih banyak PNS untuk dilakukan asesmen / uji kompetensi. Selain itu Pemkab Kotawaringin Barat juga berhasil melaksanakan simulasi dan fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan persentase kelulusan peserta 100% serta meningkatnya minat PNS untuk meningkatkan jenjang pendidikannya melalui tugas belajar dan ijin belajar. Selanjutnya juga adanya Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta layanan administrasi kepegawaian melalui aplikasi SAPASIDA ;
 - b. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN dengan capaian 46,15%. Capaian ini melewati target yang telah ditetapkan 6,67%. Faktor pendukung tercapainya target ini adalah telah berjalannya

fungsi kontrol kedisiplinan ASN melalui pembinaan secara berjenjang serta penggunaan aplikasi presensi e-kinerja.

2. Pada sasaran strategis **peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi** dengan indikator kinerja sasaran persentase aparatur yang lulus diklat, diperoleh capaian sebesar 99,05%, melewati target yang ditetapkan sebesar 77,00%.

4.2 SOLUSI

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja di tahun 2022 tentunya menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan lagi kinerja di tahun – tahun berikutnya. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi Tim Asesmen Mandiri Pemkab Kobar sehingga bisa dilakukan asesmen / uji kompetensi kepada sebagian besar bahkan seluruh ASN;
2. Perlu peningkatan pengawasan melekat oleh Kepala SKPD dan jajarannya agar pelanggaran disiplin dapat ditekan dengan maksimal;
3. Mengupayakan terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN melalui bimtek, workshop, seminar, diklat baik secara klasikal maupun non klasikal.
4. Memberikan kesempatan kepada ASN untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur pendidikan dengan tugas belajar dan ijin belajar.

Demikian LKJIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

KEPALA BADAN



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2 001